

PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI JAWA BARAT ERA DESENTRALISASI FISKAL: ANALISIS SIMULASI KEBIJAKAN¹⁾

(Fiscal Decentralization and Food Security in West Java: Policy Analysis)

Wiwiek Rindayati, Bunasor Sanim²⁾,
M. Parulian Hutagaol²⁾, dan Hermanto Siregar²⁾

ABSTRACT

The implementation of fiscal decentralization in accordance with Law No 32/2004 regarding local government and No. 33/2004 regarding inter-government fiscal relationship was considered as the new era management and local government budget. The objectives of this study were (1) to identify factors affecting regional fiscal, regional economy, poverty and food security and (2) to evaluate impact of fiscal decentralization policy on poverty and food security in West Java. The descriptive analysis and dynamic simultaneous equation models were used in this study, using pooled time series data of 1995-2005 and cross section data of 13 kabupatens estimated using the 2SLS method. The result of the study showed that the DAU was the source of 68% of regional income. The routine expenditures were the largest regional expenditures (77%). The policy of increasing agricultural development expenditures and wages affect poverty alleviation and increase food security in West Java.

Key words: fiscal decentralization, economics growth, poverty allevation, food security

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal memberi peluang bagi pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah untuk meningkatkannya, dari sisi pengeluaran dengan kendala anggaran lebih mampu membelanjakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga memberi eksternalitas pada kegiatan ekonomi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan ketahanan pangan penduduk sesuai dengan tujuan dan semangat dari desentralisasi fiskal, yaitu terciptanya demokratisasi, keadilan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sondakh, 1999; Stiglitz, 2000). Dalam implementasi desentralisasi fiskal diperlukan pembiayaan yang sangat besar di daerah karena banyaknya kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pegawai pusat yang dipindahkan ke daerah sehingga hampir 80% sumber pembiayaan pemerintah daerah digunakan untuk kegiatan operasional/pengeluaran rutin, yang mengakibatkan sumber pengeluaran untuk pembangunan menjadi sangat terbatas. Dalam keterbatasan anggaran pembangunan, peran pemerintah harus semakin dikurangi dan dioptimalkan,

¹⁾ Bagian dari disertasi penulis pertama, Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana IPB

²⁾ Berturut-turut Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing

sedangkan partisipasi masyarakat harus semakin ditingkatkan. Peran pemerintah harus benar-benar memberi eksternalitas pada berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Studi ini mengkaji berbagai alternatif peran/kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dalam konsteks implementasi desentralisasi fiskal. Tujuan penelitian adalah (1) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja fiskal daerah (penerimaan dan pengeluaran daerah), kinerja perekonomian daerah, ketahanan pangan dan kemiskinan dalam konteks implementasi desentralisasi fiskal, (2) menganalisis dampak penerapan berbagai skenario kebijakan dalam meningkatkan ketahanan pangan, dan mengurangi kemiskinan dalam konstek implementasi desentralisasi fiskal, dan (3) merumuskan implikasi kebijakan strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan dalam konteks implementasi desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab tujuan penelitian digunakan analisis deskriptif dan model ekonometrika sistem persamaan simultan dinamis yang terdiri dari 4 blok, yaitu blok fiskal daerah, PDRB, kemiskinan, dan ketahanan pangan. Model yang dibangun disusun dalam 18 persamaan struktural dan 9 persamaan identitas. Simulasi historis dilakukan pada periode masa desentralisasi fiskal (2001-2005) dengan 6 skenario kebijakan. Penelitian dilakukan di Jawa Barat dengan unit analisis daerah kabupaten berbasis pertanian. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa *pooled data (time series* tahun 1995-2005 dan *cross section* 13 kabupaten) dari BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Kabupaten, Departemen Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Jabar, Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Keuangan, Pemda Kabupaten, dan instansi lainnya yang terkait. Model diestimasi dengan metode *two stage least squares* (2 SLS).

Model secara keseluruhan dijelaskan dalam persamaan-persamaan sebagai berikut.

1. Blok Fiskal

Persamaan Penerimaan Pemerintah Daerah

$$RevDae = PAD + DALok + DBgHsl + RevDaeL \dots\dots\dots (1)$$

Persamaan PAD

$$PAD = PjkDae + Rtrbs + BUMD + LPAD \dots\dots\dots (2)$$

Persamaan Pajak Daerah

$$PjkDae = a_0 + a_1PDRB + a_2JmlTmis + a_3JmlMis + a_4LDAU + a_5DMDF + a_6LpjkDae + e_1 \dots\dots\dots (3)$$

Tanda koefisien yang diharapkan adalah $a_1, a_2, a_4, a_5 > 0$; $a_3 < 0$

Persamaan Dana Alokasi Umum

$$DALok = b_0 + b_1JmlPdk + b_2LuDae + b_3JmlMis + b_4PDRB + b_5DMDF + b_6LDALok + e_2 \dots\dots\dots (4)$$

Tanda koefisien yang diharapkan adalah $b_1, b_2, b_3, b_5, b_6 > 0$, $b_4 < 0$

Persamaan Pengeluaran Rutin

$$PRutin = c_0 + c_1JmlPeg + c_2BljBrg + c_3RevDae + c_4DMDF + c_6LPRutin + e_3 \dots\dots\dots (5)$$

Tanda koefisien yang diharapkan adalah $c_1, c_2, c_3, c_4, c_5 > 0$

Pengeluaran Pembangunan

$$PPemb = PSekPert + PsekLn \dots\dots\dots (6)$$

Pengeluaran Pembangunan Sektor Lain

$$P_{SekLn} = P_{sekT} + P_{SkKesP} + P_{SekL} \dots\dots\dots (7)$$

Persamaan Pengeluaran Pembangunan Sektor Pertanian

$$P_{SekPert} = d_0 + d_1Areal + d_2DALok + d_3PAD + d_4DMDF + d_5LP_{SekPerte}_4 \dots\dots\dots (8)$$

Tanda koefisien yang diharapkan adalah $d_1, d_2, d_3, d_4, d_5 > 0$

Persamaan Pengeluaran Pemerintah Daerah

$$GDae = PPemb + Prutin \dots\dots\dots (9)$$

Persamaan Kesenjangan Fiskal

$$K_{esFis} = RevDae - GDae \dots\dots\dots (10)$$

2. Blok Kinerja Perekonomian Daerah/Produk Domestik Regional Bruto

Persamaan PDRB Sektor Pertanian

$$PDRBP = e_0 + e_1TKP + e_2P_{SekP} + e_3IncP + e_4DMDF + e_5LPDRBPert + e_5 \dots\dots\dots (11)$$

Tanda koefisien yang diharapkan adalah : $e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 > 0$

Persamaan PDRB Sektor Non-Pertanian

$$PDRBNP = f_0 + f_1TKNP + f_2P_{SekLn} + f_3IncNP + f_4PDRBP + f_5DMDF + f_6LPDRBNP + e_6 \dots\dots\dots (12)$$

Tanda koefisien yang diharapkan adalah $f_1, f_2, f_3, f_4, f_5 > 0$

Persamaan Total PDRB

$$PDRB = PDRBP + PDRBNP \dots\dots\dots (13)$$

Persamaan Pendapatan Per Kapita

$$IKAP = PDRB/JmlPddk \dots\dots\dots (14)$$

3. Blok Ketahanan Pangan

Persamaan Produksi Gabah

$$ProdGab = g_0 + g_1QPuk + g_2TKP + g_3P_{SekP} + g_4DMDF + g_5LProdGab + e_7 \dots\dots\dots (15)$$

Tanda koefisien yang diharapkan adalah $g_1, g_2, g_3, g_4, g_5 >$

Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian

$$TKP = h_0 + h_1WTK + h_2AK + h_3Areal + h_4LTKP + e_8 \dots\dots\dots (16)$$

Tanda koefisien yang diharapkan adalah $h_1, h_2, h_3, h_4 > 0$

Persamaan Penggunaan Pupuk

$$QPuk = i_0 + i_1PPuk + i_2PGab + i_3Areal + i_4DMDF + i_5LQPuk + e_9 \dots\dots\dots (17)$$

Tanda koefisien yang diharapkan adalah : $i_2, i_3, i_4, i_5 > 0 ; i_1 < 0$

Persamaan Produksi Beras

$$ProdBrs = ProdGab * R \dots\dots\dots (18)$$

Persamaan Harga Beras

$$PBrS = j_0 + j_1ProdBrs + j_2Tconsbrs + j_3PRutin + j_4LPBrS + e_{10} \dots\dots\dots (19)$$

Tanda koefisien yang diharapkan adalah $j_2, j_3, j_4 > 0 ; j_1 < 0$

Persamaan Konsumsi Beras

$$ConBrs = k_0 + k_1PBrS + k_2IKAP + k_3JmMis + k_4DMDF + k_5LconBrs + e_{11} \dots\dots\dots (20)$$

Tanda koefisien yang diharapkan adalah $k_2, k_4, k_5 > 0 ; k_1, k_3 < 0$

Persamaan Konsumsi Energi

$$Consen = l_0 + l_1Conbrs + l_2DPKes + l_3DMDF + l_4LConsen + e_{12} \dots\dots\dots (21)$$

Tanda koefisien yang diharapkan adalah $l_1, l_2, l_3, l_4 > 0$

Persamaan Konsumsi Protein

$$Conprot = m_0 + m_1Consen + m_2T + m_3DMDF + m_4LConprot + e_{13} \dots\dots\dots (22)$$

Tanda koefisien yang diharapkan adalah $m_1, m_2, m_3, m_4 > 0$

4. Blok Indikator Kemiskinan

Persamaan Income Per Capita Sektor Pertanian

$$IncPP = n_0 + n_1ProdGab + n_2TKP + n_3DMDF + n_4LIncPP + e_{14} \dots\dots\dots (23)$$

Tanda koefisien yang diharapkan adalah $n_1, n_2, n_3, n_4 > 0$

Persamaan Jumlah Penduduk Miskin

$$JmlMis = o_0 + o_1IKAP + o_2IncP + o_3PPemb + o_4LJmlMis + e_{15} \dots \dots \dots (24)$$

Tanda koefisien yang diharapkan adalah $o_4 > 0$; $o_1, o_2, o_3 < 0$

Persamaan Jumlah Anak Gizi Buruk

$$AGzBrk = p_0 + p_1Conprot + p_2JmlPsm + p_3DMDF + p_4LAGzBrk + p_0 + e_{16} \dots \dots \dots (25)$$

Tanda koefisien yang diharapkan adalah $p_1, p_2, p_3 < 0$; $p_4 > 0$

Persamaan Angka Kematian Bayi

$$AKmtBy = q_0 + q_0AgzBrk + q_0JmlMis + q_0JmlBdn + q_0JmlPsm + q_0DMDF + q_0LAKmtBy + e_{17} \dots (26)$$

Tanda koefisien yang diharapkan adalah $q_1, q_2, q_6 > 0$; $q_3, q_4, q_5 < 0$

Persamaan Usia Harapan Hidup

$$UHHdp = r_0 + r_1Conprot + r_2AGzBrk + r_3IKAP + r_4DMDF + r_5DPKes + r_6DPPen + r_7LUHHdp + e_{18} \dots \dots \dots (27)$$

Tanda koefisien yang diharapkan adalah $r_1, r_3, r_4, r_5, r_6, r_7 > 0$; $r_2 < 0$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dalam Kinerja Fiskal Daerah pada Masa Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal membawa perubahan struktur penerimaan dan struktur pengeluaran pemerintah daerah sebagaimana tersaji pada Tabel 1. Penerimaan daerah mengalami peningkatan, jika sebelum desentralisasi secara riil sebesar 3.45 triliun rupiah, meningkat menjadi 17.72 triliun rupiah. Peningkatan terjadi pada semua komponen baik PAD, bagi hasil maupun dana transfer dari pusat. Nilai kenaikan secara relatif dari penerimaan pajak dan retribusi daerah semakin menurun karena adanya peningkatan penerimaan dari pos DAU yang kontribusinya relatif besar. Dengan demikian, walaupun secara absolut PAD meningkat, kontribusi terhadap penerimaan daerah menurun dari 20% terhadap penerimaan daerah menjadi 10%. Komponen bagi hasil pajak dan sumber daya alam juga meningkat, tetapi secara relatif *share* terhadap penerimaan daerah menurun dari 15% menjadi 13%. Pada masa desentralisasi fiskal pemerintah daerah belum berhasil menggali potensi daerah secara optimal terutama dari komponen pajak, retribusi, serta usaha daerah. Peran pemerintah daerah belum optimal di dalam meningkatkan penerimaan daerah sehingga belum tercipta kemandirian fiskal daerah sebagaimana yang diharapkan dalam desentralisasi fiskal.

Komponen dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana Subsidi Daerah Otonom (SDO) masa sebelum desentralisasi fiskal dan Dana Alokasi Umum (DAU) masa desentralisasi fiskal mengalami peningkatan sangat besar, bahkan, merupakan komponen yang peningkatannya paling besar, yaitu 2 triliun atau sebesar 58.17% sebelum desentralisasi dan meningkat menjadi 11.98 triliun atau 67.65%. Tingginya dana tranfer dari pemerintah pusat terjadi karena besarnya pengeluaran yang dibutuhkan untuk membiayai pembelanjaan pemerintah daerah. Kondisi ini mencerminkan adanya tingkat kebergantungan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah pusat yang semakin besar pada masa desentralisasi fiskal. Pada masa desentralisasi fiskal, peranan pemerintah pusat masih cukup dominan dalam penerimaan fiskal daerah.

Tabel 1. Realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 1995-2005, tahun dasar 1993 (miliar rupiah)

| Uraian | Sebelum desentralisasi fiskal (1995-2000) | | Masa desentralisasi fiskal (2001-2005) | |
|----------------------------|--|-------|---|-------|
| | Triliun (Rp) | % | Miliar (Rp) | % |
| Pendapatan asli daerah | 648.03 | 20.23 | 1 791.28 | 10.11 |
| Pajak daerah | 240.30 | 06.96 | 734.80 | 04.15 |
| Retribusi daerah | 336.64 | 01.40 | 739.26 | 04.17 |
| Laba BUMD | 13.24 | 00.38 | 37.30 | 00.20 |
| PAD lainnya | 107.85 | 03.13 | 279.94 | 01.58 |
| Dana perimbangan | 2 558.46 | 74.14 | 14 297.24 | 80.67 |
| Bagi hasil | 551.34 | 15.97 | 2 314.16 | 13.06 |
| Bagi hasil pajak | 476.42 | 13.81 | 1 944.28 | 10.97 |
| Bagi hasil SDA | 74.92 | 02.17 | 369.88 | 02.09 |
| DAU & DAK | 2 007.12 | 58.17 | 11 983.08 | 67.61 |
| Pinjaman daerah | 19.90 | 00.60 | 78.04 | 00.40 |
| Sisa anggaran | 129.37 | 03.75 | 774.68 | 04.37 |
| Pendapatan lain | 44.86 | 01.30 | 781.50 | 00.44 |
| Total pendapatan daerah | 3 450.62 | 100.0 | 17 722.70 | 100.0 |
| Pengeluaran rutin | 2 500.73 | 64.37 | 13 355.76 | 76.87 |
| Pengeluaran pembangunan | 1 384.00 | 35.62 | 4 018.36 | 23.13 |
| Sektor pertanian & irigasi | 69.35 | 01.79 | 287.68 | 01.66 |
| Sektor pertanian | 44.21 | 01.27 | 126.26 | 00.73 |
| Sektor irigasi | 25.14 | 00.65 | 161.44 | 00.93 |
| Sektor industri | 6.64 | 00.17 | 18.72 | 00.11 |
| Sektor infrastruktur | 731.90 | 18.84 | 1 579.86 | 09.09 |
| Sektor pelayanan umum | 341.04 | 08.78 | 1 393.00 | 08.02 |
| Sektor lainnya | 235.06 | 06.05 | 739.08 | 04.25 |
| Total pengeluaran daerah | 3 884.73 | 100.0 | 17 374.12 | 100.0 |

Sumber: Statistik keuangan daerah kabupaten/kota berbagai tahun terbitan

Desentralisasi fiskal membawa perubahan pada pengeluaran daerah, yaitu pengeluaran sebelum desentralisasi sebesar 3.8 triliun meningkat menjadi 17.3 triliun rupiah. Komponen pengeluaran mengalami peningkatan pada semua sektor, paling besar komponen pengeluaran rutin, yaitu sebelum desentralisasi fiskal 2.5 triliun atau sebesar 64.37% menjadi 13.3 triliun atau sebesar 76.87%. Tingginya pengeluaran rutin pada masa desentralisasi fiskal terjadi karena peningkatan jumlah pegawai pusat yang didaerahkan pada masa desentralisasi dan adanya peningkatan pengeluaran sehubungan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta perencanaan dan evaluasi pembangunan di daerah. Kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil untuk membiayai semua pengeluarannya. Kapasitas fiskal sebelum desentralisasi fiskal sebesar 32% dan menurun pada masa desentralisasi fiskal menjadi 29%. Rendahnya kapasitas fiskal daerah memberi resiko bagi berjalannya proses pembangunan di daerah karena jika terjadi kendala atau hambatan dalam penyaluran dana dari pusat akan langsung berpengaruh pada kegiatan pembangunan di daerah. Untuk itu, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memberi insentif bagi berkembangnya investasi swasta dan kegiatan ekonomi di daerah.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fiskal Daerah, Kemiskinan, dan Ketahanan Pangan

Hasil pendugaan model secara umum cukup representatif menjelaskan perilaku peubah-peubah endogen, nilai koefisien determinasi cukup tinggi berkisar

antara 0.524-0.976. Berdasarkan uji Durbin h terdapat dua persamaan yang mengalami serial korelasi. Sebagian besar peubah penjelas dalam setiap persamaan struktural berpengaruh terhadap peubah endogen pada taraf nyata sampai 20%. Hasil identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja fiskal daerah (penerimaan dan pengeluaran daerah), ketahanan pangan, dan kemiskinan disajikan pada pembahasan berikut ini (Tabel 2).

Tabel 2. Rangkuman hasil parameter dugaan model, taraf nyata dan elastisitas

| Variable | Parameter Estimate | T for H0: Parameter=0 | Prob > T | Elastisitas | | Label variabel |
|--|--------------------|-----------------------|-----------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | Jangka pendek | Jangka panjang | |
| 1. Persamaan pajak daerah | | | | | | |
| INTERCEP | -551.819796 | -0.269 | 0.788 | - | - | INTERCEP |
| PDRB | 0.187383 | 1.237 | 0.2181 | 0.0747 | 0.1717 | PDRB |
| JMLTMIS | 13.205164 | 6.036 | 0.0001 | 2.2525 | 11.2077 | Jumlah penduduk tidak miskin |
| JMLMIS | -48.345719 | -6.098 | 0.0001 | -1.6868 | -8.393 | Jumlah penduduk miskin |
| DMDF | 6267.430335 | 4.538 | 0.0001 | - | - | Dummy desentralisasi |
| LPJKDAE | 0.799019 | 6.277 | 0.0001 | - | - | Lag pajak daerah |
| 2. Persamaan dana alokasi | | | | | | |
| INTERCEP | -4374.654926 | -0.232 | 0.8183 | - | - | INTERCEP |
| JMLPDK | 50.306315 | 3.276 | 0.0013 | 0.4263 | 0.9159 | Jumlah penduduk |
| LUDAE | 11.243174 | 1.295 | 0.1975 | 0.1212 | 0.2604 | Luas daerah |
| JMLMIS | 28.696834 | 2.257 | 0.0038 | 0.1824 | 0.3919 | Jumlah penduduk miskin |
| PAD | -4.567846 | -1.013 | 0.2564 | - | - | Penerimaan asli daerah |
| DMDF | 234633 | 13.546 | 0.0001 | - | - | Dummy desentralisasi fiskal |
| LDALOK | 0.534633 | 18.434 | 0.0001 | - | - | Lag dana alokasi |
| 3. Persamaan pengeluaran rutin | | | | | | |
| INTERCEP | 53437 | 6.889 | 0.0001 | - | - | INTERCEP |
| MJPGBB | 0.015572 | 2.065 | 0.0408 | 0.0555 | 0.5393 | Multiple belanja pegawai & barang |
| PAD | 265780 | 1.860 | 0.426 | - | - | Pendapatan asli daerah |
| DALOK | 564328 | 3.835 | 0.062 | 0.1652 | 1.6055 | Dana alokasi |
| DMDF | 252609 | 18.484 | 0.0001 | - | - | Dummy desentralisasi fiskal |
| LPRUTIN | 0.897104 | 9.362 | 0.0001 | - | - | Lag pengeluaran rutin |
| 4. Persamaan pengeluaran sektor pertanian | | | | | | |
| INTERCEP | 369.026425 | 0.666 | 0.5066 | - | - | INTERCEP |
| AREAL | 0.010038 | 2.556 | 0.0116 | 0.4632 | 1.0617 | Luas areal tanaman padi |
| PAD | 3.6534 24 | 3.128 | 0.0026 | 0.0634 | 0.1453 | Penerimaan asli daerah |
| DALOK | 0.003198 | 1.346 | 0.1806 | 0.3248 | 0.7445 | Dana alokasi |
| DMDF | 2640.285718 | 7.642 | 0.0001 | - | - | Dummy desentralisasi fiskal |
| LPSEKP | 0.563788 | 6.598 | 0.0001 | - | - | Lag pengeluaran sektor pertanian |
| 5. Persamaan PDRB sektor pertanian | | | | | | |
| INTERCEP | -90.156349 | -3.11 | 0.0023 | - | - | INTERCEP |
| TKP | 1.399257 | 15.461 | 0.0001 | 0.7078 | 1.5585 | Jumlah tenaga kerja pertanian |
| PSEKP | 0.014812 | 4.452 | 0.0001 | 0.0773 | 0.1702 | Pengeluaran sektor pertanian |
| INCP | 0.569273 | 5.58 | 0.0001 | 0.3781 | 0.8325 | Pendapatan per kapita petani |
| AREAL | 3.145720 | 1.0134 | 0.3976 | - | - | Areal tanaman padi |
| LPDRBP | 0.545846 | 6.324 | 0.0001 | 0.0039 | - | Lag PDRB sektor pertanian |
| 6. Persamaan PDRB non pertanian | | | | | | |
| INTERCEP | -1918.283489 | -13.09 | 0.0001 | - | - | INTERCEP |
| TKNP | 5.158899 | 13.32 | 0.0001 | 0.7758 | 1.4789 | Jumlah tenaga kerja nonpertanian |
| PSEKLN | 0.003415 | 3.697 | 0.0003 | 0.1043 | 0.1988 | Pengeluaran sektor lainnya |
| INCNP | 338.119562 | 74.18 | 0.0001 | 0.9185 | 1.7509 | Pendapatan/kapita nonpertanian |
| PDRBP | 0.436852 | 1.02 | 0.4002 | - | - | PDRB sektor pertanian |
| LPDRBNP | 4754332 | 5.25 | 0.0008 | - | - | Lag PDRB nonpertanian |
| 7. Persamaan produksi gabah | | | | | | |
| INTERCEP | -191906 | -3.05 | 0.0027 | - | - | INTERCEP |
| PGAP | 0.561906 | 2.35 | 0.0056 | 0.1540 | 0.2771 | Harga gabah |
| QPUK | 0.081642 | 10.37 | 0.0001 | 0.6970 | 0.9254 | Jumlah pupuk |
| TKP | 959.734694 | 7.88 | 0.0001 | 0.4417 | 0.7948 | Jumlah tenaga kerja pertanian |
| PSEKP | 5.810158 | 0.751 | 0.4537 | - | - | Pengeluaran sektor pertanian |
| DMDF | 256025 | 5.578 | 0.0001 | - | - | Dummy desentralisasi |
| LPRODGB | 0.444217 | 2.686 | 0.0081 | - | - | Lag produksi gabah |

Selanjutnya....

| 8. Persamaan pendapatan per kapita petani | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-----------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| Variable | Parameter Estimate | T for H0: Parameter=0 | Prob > T | Elastisitas | | Label variabel |
| | | | | Jangka pendek | Jangka panjang | |
| INTERCEP | 159.154332 | 7.899 | 0.0001 | - | - | INTERCEP |
| PRODGAB | 0.000152 | 4.594 | 0.0001 | 0.2515 | 0.2859 | Produksi gabah |
| PSEKL | -0.000459 | -4.035 | 0.0001 | -0.074 | -0.0841 | Pengeluaran nonpertanian |
| TKP | 0.498065 | 8.129 | 0.0001 | 0.3793 | 0.4312 | Jumlah tenaga kerja pertanian |
| LINCPPI | 0.12029 | 0.457 | 0.6533 | - | - | Lag pendapatan/kapita petani |
| 9. Persamaan tenaga kerja pertanian | | | | | | |
| INTERCEP | -10.291493 | -0.196 | 0.8445 | - | - | INTERCEP |
| AK | 0.00033 | 8.752 | 0.0001 | 0.8211 | 1.2936 | Jumlah angkatan kerja |
| WTKP | 0.004909 | 1.267 | 0.2073 | 0.1939 | 0.3054 | Upah tenaga kerja pertanian |
| AREAL | 0.000050371 | 0.273 | 0.7873 | - | - | Luas areal tanaman padi |
| PSEKPP | 1.240132 | 1.620 | 0.1245 | 0.1026 | 0.1616 | Pengeluaran sektor pertanian |
| DMDFP | 216521 | 1.485 | 0.1941 | - | - | Dummy desentralisasi fiskal |
| LTKP | 0.36521 | 2.485 | 0.0141 | - | - | Lag jumlah tenaga kerja pertanian |
| 10. Persamaan penggunaan pupuk | | | | | | |
| INTERCEP | 2547265 | 5.253 | 0.0001 | - | - | INTERCEP |
| AREAL | 38.482878 | 12.554 | 0.0001 | 0.9877 | 1.0931 | Luas areal pangan |
| PPUK | -2665.41062 | -5.819 | 0.0001 | -0.6015 | -0.7266 | Harga pupuk |
| PGAB | 516.228199 | 1.064 | 0.2893 | 0.1246 | 0.1505 | Harga gabah |
| DMDFP | 216521 | 1.205 | 0.2046 | - | - | Dummy desentralisasi fiskal |
| LQPUK | 0.17217 | 1.382 | 0.1692 | - | - | Lag jumlah pupuk |
| 11. Persamaan harga gabah | | | | | | |
| INTERCEP | -137.84452 | -10.668 | 0.0001 | - | - | INTERCEP |
| PPUK | 0.87685 | 6.768 | 0.0067 | 0.4562 | 0.4715 | Harga pupuk |
| WTKP | 0.015005 | 11.729 | 0.0001 | 0.1324 | 0.1368 | Upah tenaga kerja pertanian |
| PBRSP | 0.489051 | 196.943 | 0.0001 | 0.9777 | 1.0106 | Harga beras |
| PSEKPP | 0.000055 | 0.052 | 0.9588 | - | - | Pengeluaran sektor pertanian |
| DMDFP | 0.162344 | 2.004 | 0.0160 | - | - | Dummy desentralisasi fiskal |
| LPGAP | 0.032548 | 3.758 | 0.0003 | - | - | Lag harga gabah |
| 12. Persamaan harga beras | | | | | | |
| INTERCEP | 1212.870707 | 5.90812 | 0.0001 | - | - | INTERCEP |
| PRODBRS | -0.000154 | -0.3923 | 0.6974 | - | - | Produksi beras |
| PRUTIN | 0.006145 | 13.2214 | 0.0001 | 0.4637 | 2.9131 | Pengeluaran rutin |
| CADBRSP | -4567.987621 | -1.229 | 0.3260 | - | - | Cadangan beras nasional |
| DMDFP | 0.223443 | 2.123 | 0.0065 | - | - | Dummy desentralisasi |
| LPBRSP | 0.840819 | 6.881 | 0.0001 | - | - | Lag harga beras |
| 13. Persamaan konsumsi beras | | | | | | |
| INTERCEP | 14.071878 | 97.89 | 0.0001 | - | - | INTERCEP |
| PBRSP | -0.000119 | -2.726 | 0.0073 | -0.0222 | -0.0337 | Harga beras |
| JMLMIS | -0.002361 | -6.506 | 0.0001 | -0.0464 | -0.0704 | Jumlah penduduk miskin |
| IKAP | 0.000021853 | 1.515 | 0.1321 | 0.0032 | 0.0048 | Pendapatan per kapita |
| DMDFP | -0.232747 | -0.834 | 0.2805 | - | - | Dummy desentralisasi |
| LCONBRSP | 0.34167 | 2.835 | 0.0053 | - | - | Lag konsumsi beras |
| 14. Persamaan konsumsi energi | | | | | | |
| INTERCEP | 312.989317 | 3.958 | 0.0001 | - | - | INTERCEP |
| CONBRSP | 141.703236 | 23.8224 | 0.0001 | 0.8552 | 0.956 | Konsumsi beras |
| IKAP | 0.257806 | 2.5156 | 0.0321 | 0.1535 | 0.1716 | Pendapatan per kapita |
| DPKES | 0.00066 | 0.7235 | 0.4708 | - | - | Pengeluaran kesehatan |
| DMDFP | -3.23653 | -2.9582 | 0.002 | - | - | Dummy desentralisasi fiskal |
| LCONSENI | 0.105435 | 1.969 | 0.051 | - | - | Lag konsumsi energi |
| 15. Persamaan konsumsi protein | | | | | | |
| INTERCEP | -1414.334811 | -9.7621 | 0.0001 | - | - | INTERCEP |
| CONSENI | 0.020636 | 12.632 | 0.0001 | 0.7827 | 1.5843 | Lag konsumsi energi |
| IKAP | 5.257806 | 2.0156 | 8321 | 0.3502 | 0.7088 | Pendapatan per kapita |
| JMLMIS | -2.005260 | -3.2.506 | 0.0001 | -0.0258 | -0.0522 | Jumlah penduduk miskin |
| TREND | 0.714154 | 9.934 | 0.0001 | - | - | Trend |
| DMDFP | -1.161020 | -4.657 | 0.0001 | - | - | Dummy desentralisasi |
| LCONPROT | 0.5059780 | 5.255 | 0.0001 | - | - | Lag konsumsi protein |
| 16. Persamaan jumlah penduduk miskin | | | | | | |
| INTERCEP | 31.383654 | 1.405 | 0.1622 | - | - | INTERCEP |
| DPKSMIS | -1.813909 | -3.225 | 0.0016 | -0.1078 | -0.1908 | Pengeluaran kes/penduduk miskin |
| IKAP | -0.002598 | -1.195 | 0.2341 | -0.0192 | -0.0341 | Pendapatan per kapita |
| PFEMB | -0.000032 | -0.209 | 0.8346 | - | - | Pengeluaran pembangunan |
| JMLPDK | 0.171142 | 11.952 | 0.0001 | 1.0078 | 1.7831 | Jumlah penduduk |
| DMDFP | -1.161020 | -1.021 | 0.3205 | - | - | Dummy desentralisasi |
| LJMLMIS | 0.434785 | 5.172 | 0.0001 | - | - | Lag jumlah penduduk miskin |

Selanjutnya.....

| 17. Persamaan angka gizi buruk | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|---------------|----------------|----------------------------------|
| Variable | Parameter Estimate | T for H0: Parameter=0 | Prob > T | Elastisitas | | Label variabel |
| | | | | Jangka pendek | Jangka panjang | |
| INTERCEP | 3525.48931 | 9.2551 | 0.0001 | - | - | INTERCEP |
| CONPROT | -1.006225 | -2.938 | 0.0039 | -2.6763 | -4.3728 | Konsumsi protein |
| JMLPSM | -0.010427 | -0.652 | 0.5155 | - | - | Jumlah puskesmas |
| IKAP | -3.025467 | -4.2552 | 0.0001 | -0.0247 | -0.0404 | Pendapatan per kapita |
| JMLSKLH | -2.408931 | -0.8213 | 0.4351 | - | - | Jumlah sekolah |
| JMLBHRP | 0.423356 | 1.0255 | 0.3621 | - | - | Jumlah penduduk buta huruf |
| D MDF | 1.7222 | 9.165 | 0.0001 | - | - | Dummy desentralisasi |
| LAGZBRK | 0.387974 | 3.448 | 0.0007 | - | - | Lag anak gizi buruk |
| 18. Persamaan angka kematian bayi | | | | | | |
| INTERCEP | 48.399147 | 15.622 | 0.0001 | - | - | INTERCEP |
| AGZBRK | 0.395665 | 4.695 | 0.0001 | 0.1471 | 0.2423 | Angka anak gizi buruk |
| JMLMIS | 0.021822 | 3.886 | 0.0002 | 0.097 | 0.1598 | Jumlah penduduk miskin |
| JMLBDN | -0.010886 | -1.638 | 0.1038 | -0.057 | -0.0093 | Jumlah bidan |
| MDKSPN | -2.10E-09 | -1.837 | 0.0684 | -0.004 | -0.0066 | Multiple pengeluaran kes & pend. |
| D MDF | -2.399693 | -1.777 | 0.0779 | - | - | Dummy desentralisasi |
| LAKMTBY | 0.392946 | 3.8 | 0.0002 | - | - | Lag angka kematian bayi |
| 19. Persamaan usia harapan hidup | | | | | | |
| INTERCEP | 65.157453 | 15.87 | 0.0001 | - | - | INTERCEP |
| CONPROT | 0.1261 | 1.917 | 0.0573 | 0.1123 | 0.1316 | Konsumsi protein |
| DPKSMIS | 0.033875 | 3.53 | 0.0006 | 0.0081 | 0.0094 | Pengeluaran kes/penduduk miskin |
| AKMBY | -0.150308 | -7.609 | 0.0001 | -0.1353 | -0.1586 | Angka kematian bayi |
| D MDF | 0.207502 | 0.576 | 0.5656 | - | - | Dummy desentralisasi |
| LUHHDP | 0.354258 | 3.472 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0009 | Lag usia harapan hidup |

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah

Faktor yang nyata berpengaruh positif terhadap pajak daerah adalah PDRB, jumlah penduduk tidak miskin, *dummy* desentralisasi fiskal, dan lag pajak daerah, sedangkan jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap pajak daerah. *Dummy* desentralisasi fiskal yang bernilai positif menunjukkan pajak daerah setelah desentralisasi fiskal bernilai lebih besar, dengan desentralisasi fiskal daerah lebih dapat menggali potensi penerimaan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah (Sondakh, 1999). Dana alokasi nyata dipengaruhi positif oleh jumlah penduduk, luas daerah, jumlah penduduk miskin, dan *dummy* desentralisasi fiskal. *Dummy* desentralisasi fiskal yang bernilai positif menunjukkan bahwa masa desentralisasi fiskal mengalami kenaikan dana transfer dari pemerintah pusat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran daerah

Pengeluaran daerah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan terdiri dari pengeluaran pembangunan sektor pertanian dan pengeluaran sektor lain. Pengeluaran rutin secara nyata dipengaruhi oleh jumlah pegawai, belanja barang, dana alokasi, *dummy* desentralisasi fiskal, dan lag pengeluaran rutin. *Dummy* desentralisasi fiskal yang bernilai positif bahwa nilai pengeluaran rutin pada masa desentralisasi fiskal relatif lebih besar. Pengeluaran sektor pertanian secara nyata dipengaruhi positif oleh areal tanaman padi, PAD, dana alokasi, *dummy* desentralisasi fiskal dan lag pengeluaran sektor pertanian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB kabupaten di Jawa Barat

PDRB dibedakan antara PDRB sektor pertanian dan PDRB nonpertanian. PDRB pertanian dipengaruhi positif oleh tenaga kerja sektor pertanian, pengeluaran pembangunan sektor pertanian, pendapatan sektor pertanian, dan lag pembangunan sektor pertanian. PDRB nonpertanian dipengaruhi positif oleh

tenaga kerja sektor nonpertanian, pengeluaran pembangunan sektor lain, dan pendapatan non pertanian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi gabah

Faktor yang nyata mempengaruhi produksi gabah adalah harga gabah, jumlah penggunaan pupuk, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, *dummy* desentralisasi fiskal, dan produksi gabah tahun sebelumnya. Dana pengeluaran sektor pertanian tidak nyata mempengaruhi produksi gabah, produksi gabah lebih dominan dipengaruhi secara langsung oleh penggunaan input pupuk dan tenaga kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan sektor pertanian

Pendapatan sektor pertanian nyata dipengaruhi positif oleh produksi gabah, tenaga kerja sektor pertanian, lag pendapatan sektor pertanian. Pengeluaran pembangunan sektor lain berpengaruh negatif terhadap pendapatan sektor pertanian. Sebagai daerah sentra produksi beras, pendapatan sektor pertanian dipengaruhi produksi gabah karena usaha tani padi merupakan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk di daerah penelitian. Nilai elastisitas 0.2515 sesuai dengan kenyataan bahwa bagi petani daerah penelitian, produksi padi bukan merupakan sumber pendapatan satu-satunya, tetapi terdapat sumber pendapatan lain baik dari subsektor lain pada sektor pertanian maupun dari sektor di luar pertanian. Jumlah keterlibatan penduduk pada sektor pertanian sebagai tenaga kerja akan mempengaruhi pendapatannya karena pada sektor pertanian khususnya padi sebagian besar pemilik juga ikut terlibat sebagai tenaga kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja sektor pertanian

Tenaga kerja sektor pertanian nyata dipengaruhi positif oleh angkatan kerja, upah sektor pertanian, dan pengeluaran pembangunan sektor pertanian. Angkatan kerja merupakan jumlah penduduk usia kerja baik yang sedang bekerja maupun yang tidak bekerja, angkatan kerja yang meningkat diikuti oleh penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian juga semakin besar karena pertanian berfungsi sebagai *employment of last resort* (Ikhsan, 2001).

Pada sektor pertanian dengan tenaga kerja keluarga ikut dominan terlibat dalam proses produksi, jumlah penggunaan tenaga kerja yang terlibat mempunyai hubungan positif dengan tingkat upah. Upah merupakan insentif bagi tenaga kerja sehingga semakin besar tingkat upah, semakin meningkat jumlah tenaga kerja yang terlibat pada sektor tersebut. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Pakasi (2005) bahwa upah pada sektor pertanian berhubungan positif dengan tenaga kerja pada sektor pertanian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan pupuk

Jumlah penggunaan pupuk dipengaruhi positif oleh areal tanaman padi, harga gabah, dan lag pemakaian pupuk, sedangkan harga pupuk berpengaruh negatif terhadap jumlah penggunaan pupuk. Harga pupuk berhubungan negatif dengan penggunaan pupuk. Jika harga pupuk naik sementara pendapatan petani konstan, daya beli petani akan turun dan pemakaian pupuk akan cenderung turun.

Harga gabah merupakan insentif bagi petani karena jika harga gabah naik dengan faktor lain konstan, pendapatan petani naik sehingga petani terinsentif untuk memproduksi gabah lebih banyak. Dengan kenaikan pendapatan, daya beli

petani akan meningkat sehingga petani akan mampu membeli input pupuk yang lebih banyak untuk produksi gabah karena pupuk merupakan input yang dominan.

Areal tanaman padi mencerminkan kondisi skala usaha pada usaha tani padi sehingga mempunyai hubungan positif dengan penggunaan pupuk, yakni areal tanaman padi yang lebih luas juga memerlukan penggunaan pupuk yang lebih banyak. Nilai elastisitas sebesar 0.9877 menunjukkan bahwa jika areal tanaman padi meningkat 10%, penggunaan pupuk akan meningkat sebesar 9.88%. Hal ini mencerminkan kondisi yang relatif konstan pada penggunaan pupuk per satuan areal tanaman padi, yakni jika areal tanaman padi berubah pada satuan luas tertentu, penggunaan pupuk akan mengikutinya dengan satuan jumlah yang proporsional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga gabah

Harga gabah dipengaruhi positif oleh harga pupuk, upah sektor pertanian, harga beras, dan lag harga gabah. Harga gabah tidak mengikuti mekanisme pasar sehingga tidak dipengaruhi oleh produksi gabah, tetapi pemerintah cenderung mengintervensi dengan penerapan harga dasar gabah (HDG) selanjutnya menjadi harga pembelian pemerintah (HPP).

Harga pupuk dan upah tenaga kerja sektor pertanian mempengaruhi harga gabah. Jika harga pupuk dan upah di sektor pertanian yang merupakan harga faktor produksi meningkat, gabah yang merupakan outputnya akan mengikuti. Harga gabah dipengaruhi oleh harga beras dengan hubungan positif. Jika harga beras di pasar tinggi, harga gabah akan mengikuti, begitu sebaliknya. Nilai elastisitas sebesar 0.9777 artinya jika harga beras naik sebesar 10%, harga gabah akan naik sebesar 9.78%, sebagai perubahan yang proporsional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga beras

Harga beras berhubungan negatif dengan produksi beras, artinya jika produksi beras meningkat, harga beras akan turun. Hal ini sesuai dengan fenomena ekonomi bahwa jika produksi meningkat, ketersediaan di pasar akan berlebih sehingga harga akan cenderung turun. Namun, hal ini secara statistik tidak nyata karena harga beras tidak sepenuhnya dilepas pada mekanisme pasar. Pemerintah selalu melakukan intervensi untuk menjaga kestabilan harga beras dengan melakukan operasi pasar murni (OPM) jika harga beras cenderung naik pada batas aman serta melakukan stok dan pembelian pada saat panen raya dan harga jatuh. Pengeluaran rutin nyata berpengaruh positif terhadap harga beras, komponen dari pengeluaran rutin salah satunya adalah gaji pegawai. Kenaikan gaji pegawai biasanya diikuti oleh kenaikan harga barang terutama harga makanan pokok, salah satu di antaranya adalah beras.

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi beras

Konsumsi beras dipengaruhi negatif oleh harga beras, jumlah penduduk miskin, dan *dummy* desentralisasi fiskal, dan dipengaruhi positif oleh pendapatan per kapita dan lag konsumsi beras. Harga beras nyata berpengaruh negatif terhadap konsumsi beras dengan elastisitas -0.222. Kecilnya elastisitas beras terhadap perubahan harga menunjukkan bahwa beras merupakan makanan pokok di Jawa Barat. Perubahan harga hanya sedikit menurunkan konsumsi dan tidak mengubah konsumen beras untuk mengubah konsumsi dengan beralih pada barang substitusi dari beras. Pendapatan per kapita berhubungan positif dengan

konsumsi beras, menunjukkan bahwa beras masih merupakan barang normal sehingga jika pendapatan naik, konsumsi beras akan naik. Kondisi masyarakat di daerah penelitian rata-rata kenaikan pendapatannya masih digunakan untuk meningkatkan konsumsi makanan pokok beras sebagai sumber karbohidrat walaupun dalam proporsi kecil, yang ditunjukkan dengan elastisitas sebesar 0.1321.

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi energi

Konsumsi energi dipengaruhi positif oleh konsumsi beras, pendapatan per kapita, dana kesehatan, dan lag konsumsi energi. Konsumsi energi merupakan turunan dari konsumsi beras, jika konsumsi beras meningkat, konsumsi energi akan meningkat karena beras merupakan sumber utama karbohidrat. Elastisitas sebesar 0.8552 menunjukkan bahwa pola makan penduduk di daerah penelitian sebagian besar masih didominasi oleh beras sebagai makanan pokok sehingga perubahan konsumsi beras dengan konsumsi energi searah dengan besaran yang hampir sama. Nilai elastisitas kurang dari satu menunjukkan bahwa selain beras masih ada makanan lain sebagai sumber energi di dalam makanan pokok penduduk.

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi protein

Faktor yang nyata mempengaruhi konsumsi protein adalah konsumsi energi, pendapatan per kapita, *trend*, *dummy* desentralisasi fiskal, dan konsumsi protein tahun sebelumnya. Konsumsi energi yang berpengaruh positif menunjukkan bahwa makanan pokok penduduk di daerah penelitian mengandung komposisi kandungan energi dan protein yang relatif seimbang. Pendapatan per kapita berpengaruh positif, menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan digunakan untuk meningkatkan konsumsi protein karena protein merupakan makanan yang lebih bergizi. Jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap konsumsi protein karena rata-rata konsumsi protein penduduk miskin masih di bawah standar kecukupan gizi (AKG) sehingga peningkatan jumlah penduduk miskin akan menurunkan rata-rata konsumsi protein.

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin

Jumlah penduduk miskin dipengaruhi nyata oleh pengeluaran kesehatan per penduduk miskin, pendapatan per kapita, jumlah penduduk, dan lag jumlah penduduk miskin, sedangkan pengeluaran pembangunan tidak berpengaruh nyata pada jumlah penduduk miskin.

Pengeluaran kesehatan per penduduk miskin berhubungan negatif dengan nilai elastisitas sebesar -0.1078. Dana kesehatan bagi penduduk miskin sangat diperlukan karena peningkatan kesehatan bagi masyarakat miskin merupakan peningkatan produktivitasnya yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Bigsten (1992) dan ILO (1976) bahwa pendekatan yang cocok untuk pengurangan kemiskinan adalah dengan strategi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan), yang sarannya adalah peningkatan taraf hidup masyarakat miskin karena jika kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi, produktivitas dan pendapatan meningkat.

Pendapatan per kapita berhubungan negatif dengan elastisitas sebesar -0.0192. Nilai elastisitas yang inelastis menunjukkan bahwa peningkatan

pendapatan tidak sepenuhnya dinikmati oleh golongan masyarakat miskin, tetapi yang menikmatinya justru dari golongan masyarakat mampu sehingga peningkatan pendapatan hanya kecil sekali mengurangi angka kemiskinan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi angka anak gizi buruk

Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap angka anak gizi buruk adalah konsumsi protein, pendapatan per kapita, *dummy* desentralisasi fiskal, dan lag angka gizi buruk. Jumlah puskesmas tidak berpengaruh nyata terhadap angka anak gizi buruk. Konsumsi protein berhubungan negatif dengan elastisitas sebesar -2.6763 karena protein merupakan sumber gizi yang baik untuk pertumbuhan. Jika konsumsi protein terpenuhi, kebutuhan gizi akan terpenuhi.

Jumlah puskesmas berhubungan negatif dengan angka anak gizi buruk, tetapi tidak berpengaruh nyata, artinya jika jumlah puskesmas meningkat, diharapkan angka anak gizi buruk akan turun. Namun, secara fisik saja jumlah puskesmas tidak nyata dan agar jumlah puskesmas berpengaruh nyata terhadap penurunan angka anak gizi buruk seharusnya setiap puskesmas memberi pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat miskin dan bersikap proaktif terhadap program-program yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat miskin. Kondisi yang ada sekarang menunjukkan pelayanan kesehatan di puskesmas terhadap masyarakat miskin yang masih kurang sehingga keberadaan puskesmas tidak berpengaruh nyata terhadap penurunan angka anak gizi buruk.

Faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi

Faktor yang berpengaruh nyata terhadap angka kematian bayi adalah angka gizi buruk, jumlah penduduk miskin, jumlah bidan, pengeluaran kesehatan dan pendidikan, dan *dummy* desentralisasi fiskal. Jumlah penduduk miskin berhubungan positif dengan angka kematian bayi karena penduduk miskin adalah penduduk yang tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, peluang terjadinya kematian dalam proses kelahiran lebih besar karena kemungkinan status gizi yang tidak mendukung, pengetahuan tentang kesehatan yang kurang juga kondisi kesehatan yang tidak terpenuhi.

Dana pengeluaran kesehatan dan pendidikan berhubungan negatif dengan angka kematian bayi karena semakin besar dana kesehatan dan pendidikan, semakin besar fasilitas yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan sehingga masyarakat akan semakin sadar akan kesehatan yang akhirnya akan berpengaruh pada angka kematian bayi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi umur harapan hidup

Faktor-faktor yang nyata berpengaruh pada umur harapan hidup adalah konsumsi protein, pengeluaran kesehatan per penduduk miskin, angka kematian bayi, dan lag umur harapan hidup. Konsumsi protein berhubungan positif. Protein merupakan zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak sehingga jika tingkat konsumsi protein berkecukupan akan mempengaruhi kondisi kesehatan konsumen dan kondisi ini akan berpengaruh pada kondisi umur harapan hidup seseorang. Pengeluaran kesehatan per penduduk miskin berhubungan positif dengan umur harapan hidup. Pengeluaran kesehatan yang langsung ditujukan oleh penduduk miskin akan langsung dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin dan akan berpengaruh pada

umur harapan hidup. Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator status gizi dari golongan masyarakat rawan gizi. Jika kondisi ini semakin baik, kondisi dan kualitas SDM akan dipengaruhi sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi kondisi umur harapan hidup.

Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Kinerja Fiskal, Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Barat

Hasil validasi berdasarkan kriteria statistik memberikan nilai Bias (UM), Reg (UR) dan Var (US) yang secara keseluruhan mendekati nol, serta nilai U-Theil secara keseluruhan juga mendekati nol yang mengindikasikan bahwa simulasi model secara umum relatif baik karena mendekati data aktualnya (Pyndyck and Rubinfeld, 1977).

Tabel 3 menyajikan dampak alternatif kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan dengan skenario S1 (peningkatan pengeluaran sektor pertanian 20%), S2 (peningkatan harga pupuk 15%), S3 (peningkatan harga gabah 15%), S4 (peningkatan upah sektor pertanian 15%), S5 (kombinasi peningkatan harga pupuk dan harga gabah), dan S6 (kombinasi peningkatan pengeluaran sektor pertanian dan upah pertanian) terhadap kinerja fiskal, perekonomian daerah, kemiskinan, dan ketahanan pangan di Jawa Barat.

Tabel 3. Dampak alternatif kebijakan terhadap kinerja fiskal, perekonomian daerah, kemiskinan dan ketahanan pangan di Jawa Barat pada masa desentralisasi fiskal (2001-2005)

| Peubah endogen | Nilai dasar | S1 (%) | S2 (%) | S3 (%) | S4 (%) | S5 (%) | S6 (%) |
|----------------------|-------------|---------|-----------|---------|----------|----------|----------|
| REVDAE (Miliar Rp) | 475152 | 0.0011 | -0.00042 | 0.0020 | 0.00105 | -0.0003 | 0.00210 |
| PAD (Miliar Rp) | 27839 | 0.0144 | -0.00718 | 0.0052 | 0.01796 | -0.0035 | 0.03233 |
| PJKDAE (Miliar Rp) | 12060 | 0.0332 | -0.01658 | 0.0102 | 0.03317 | -0.0018 | 0.07463 |
| DALOK (Miliar Rp) | 282803 | -0.0003 | 0.00008 | -0.0004 | -0.00004 | 0.0005 | -0.00012 |
| PRUTIN (Miliar Rp) | 322286 | 0.0020 | 0.00093 | 0.0013 | 0.00360 | 0.0017 | 0.00627 |
| PPEMB (Miliar Rp) | 117005 | 0.0013 | 0.00024 | 0.0009 | 0.00063 | 0.0009 | 0.00228 |
| PSEKLN (Miliar Rp) | 112863 | 0.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.00000 |
| PSEKP (Miliar Rp) | 4142 | 20.0000 | 0.00009 | 0.0004 | 0.00008 | 0.0003 | 20.00000 |
| GDAE (Miliar Rp) | 439291 | 0.0002 | -0.00034 | 0.0010 | 0.00082 | 0.0002 | 0.00018 |
| KESFIS (Miliar Rp) | 35861 | -3.0053 | 0.00558 | -0.0005 | 0.01115 | 0.0019 | -3.03951 |
| PDRBP (Miliar Rp) | 592.2146 | 2.8420 | -1.25107 | 0.3026 | 4.45190 | -0.7928 | 7.29384 |
| PDRBNP (Triliun Rp) | 2414 | 0.0006 | -0.00002 | 0.0005 | 0.00024 | -0.0003 | 0.00026 |
| PDRB (Triliun Rp) | 3007 | 0.5321 | -0.26605 | 0.0333 | 0.86465 | -0.1360 | 1.43000 |
| PRODGAB (Ton) | 648847 | 0.9825 | -13.19633 | 3.1923 | 2.48425 | -8.3372 | 3.46676 |
| INCPPI (Ribu Rp) | 362.2849 | 0.2675 | -3.59245 | 0.8690 | 2.71626 | -2.0967 | 2.98373 |
| TKP (Ribu Orang) | 292.6429 | 0.3460 | -0.06360 | 0.2012 | 5.07048 | -0.0350 | 5.07048 |
| QPUK (Ton) | 4031705 | -0.0032 | -26.01316 | 6.2927 | 0.57065 | -11.9625 | 0.56743 |
| PGAB (Rp/Kg) | 1552 | -0.0644 | 0.25773 | 15.0000 | 2.83505 | 15.0000 | 2.83505 |
| PRODBRS (Ton) | 421751 | 0.9823 | -13.19641 | 3.1922 | 2.48417 | -8.3371 | 3.46674 |
| IKAP (Rp/Th) | 1.959 | 0.4033 | -0.26544 | 0.0715 | 0.94946 | -0.1556 | 1.34763 |
| PBRS (Rp/Kg) | 3085 | -0.0324 | 0.25932 | -0.0648 | -0.06483 | 0.2039 | -0.09724 |
| CONBRS (Kg/Kap/Bl) | 12.9312 | 0.0095 | -0.00773 | 0.0023 | 0.00158 | -0.0040 | 0.00309 |
| CONSEN (Kkal/Kap/Hr) | 2149 | 0.0005 | -0.00052 | 0.0004 | 0.00145 | 0.0006 | 0.00072 |
| CONPROT (Gr/Kap/Hr) | 56.6952 | 0.0009 | -0.00529 | 0.0012 | 0.00106 | -0.0038 | 0.00176 |
| JMLMIS (Orang) | 250.6949 | -0.0144 | 0.00029 | -0.0006 | -0.00005 | 0.0002 | -0.01436 |
| AGZBRK (%) | 17.7094 | -0.0028 | 0.01694 | -0.0045 | -0.00339 | 0.0083 | -0.00621 |
| AKMTBY (Jiwa/1000) | 54.7641 | -0.0018 | 0.00219 | -0.0005 | -0.00055 | 0.0012 | -0.00219 |
| UHHDP (Tahun) | 65.132 | 0.0003 | -0.00092 | 0.0002 | 0.00015 | -0.0005 | 0.00046 |

Peningkatan pengeluaran sektor pertanian (S1) masih diperlukan mengingat selama ini pengeluaran sektor pertanian masih relatif kecil, padahal sektor ini menampung tenaga kerja cukup besar di perdesaan dan sektor ini juga punya keterkaitan ke depan dan ke belakang yang relatif besar dengan sektor lain. Peningkatan pengeluaran sektor pertanian berdampak pada peningkatan PDRB dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, PDRB nonpertanian, dan PDRB yang selanjutnya meningkatkan pendapatan per kapita. Peningkatan pengeluaran sektor pertanian juga meningkatkan produksi gabah dan pendapatan sektor pertanian, yang diikuti oleh menurunnya harga gabah dan beras, meningkatkan konsumsi beras, energi dan protein, menurunkan jumlah penduduk miskin, angka gizi buruk, dan angka kematian bayi, serta meningkatkan umur harapan hidup. Kemudian kinerja fiskal meningkat melalui penurunan kesenjangan fiskal karena penurunan jumlah penduduk miskin berarti mengurangi beban subsidi pemerintah bagi masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak sehingga meningkatkan pendapatan daerah. Secara umum peningkatan pengeluaran sektor pertanian berdampak pada peningkatan kinerja perekonomian daerah, peningkatan kinerja ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kinerja fiskal daerah.

Simulasi peningkatan harga pupuk (S2) diperlukan dalam upaya untuk menghapuskan subsidi pupuk. Keterbatasan anggaran pembangunan mengharuskan pemerintah untuk lebih selektif dalam melakukan subsidi. Penghapusan subsidi pupuk yang dalam simulasi ini diproduksi dengan kenaikan harga pupuk berdampak pada penurunan penggunaan pupuk, penurunan produksi gabah, dan penurunan PDRB sektor pertanian sehingga menurunkan pendapatan sektor pertanian, pendapatan per kapita, dan konsumsi beras, energi, dan protein, meningkatkan jumlah penduduk miskin, angka gizi buruk, angka kematian bayi, dan menurunkan umur harapan hidup. Peningkatan harga pupuk mempunyai dampak yang besar pada penurunan produksi gabah dan penurunan pendapatan petani sehingga menurunkan ketahanan pangan dan meningkatkan kemiskinan walaupun relatif kecil. Hasil simulasi ini memberi implikasi bahwa harga pupuk perlu mendapat pengamanan dari pemerintah dan sampai saat ini subsidi pupuk masih diperlukan karena pupuk merupakan input dominan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk ikut mengawasi peredaran pupuk agar pupuk bersubsidi dapat sampai ke tangan petani dengan efisien dan tepat waktu.

Kebijakan peningkatan harga gabah (S3) merupakan alternatif yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam upaya memberi insentif petani padi dalam rangka mengamankan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP). Peningkatan harga gabah merupakan salah satu kompensasi dari penghapusan subsidi input bagi petani. Peningkatan harga gabah berdampak pada peningkatan PDRB dan penyerapan tenaga kerja pertanian, PDRB nonpertanian, PDRB sektor pertanian, dan pendapatan per kapita. Selain itu, juga meningkatkan penggunaan pupuk, produksi gabah, pendapatan sektor pertanian, konsumsi beras, energi, dan protein menurunkan jumlah kemiskinan, angka gizi buruk, angka kematian bayi, dan meningkatkan umur harapan hidup. Dampak paling besar dari peningkatan harga gabah adalah peningkatan produksi gabah yang didahului oleh peningkatan penggunaan pupuk.

Peningkatan upah sektor pertanian (S4) masih diperlukan karena tingkat upah dan pendapatan pada sektor pertanian masih relatif kecil jika dibandingkan dengan sektor lain sehingga diharapkan dapat sebagai daya tarik terutama bagi tenaga kerja trampil dan berpendidikan. Kebijakan ini berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, produksi gabah, pendapatan sektor pertanian, PDRB sektor pertanian, pendapatan per kapita, konsumsi beras, energi dan protein, serta menurunkan jumlah penduduk miskin, angka gizi buruk, angka kematian bayi dan meningkatkan umur harapan hidup. Dampak paling besar terjadi pada peningkatan tenaga kerja dan pendapatan pertanian. Peningkatan produktivitas petani dengan mengembangkan peningkatan kualitas SDM petani merupakan alternatif kebijakan dalam peningkatan upah sektor pertanian.

Kombinasi peningkatan harga gabah dan harga pupuk (S5) dengan proporsi yang sama memberi dampak pada penurunan penggunaan pupuk sehingga menurunkan produksi gabah dan PDRB pertanian. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan sektor pertanian dan pendapatan per kapita, penurunan konsumsi beras, energi, dan protein. Peningkatan angka gizi buruk, dan angka kematian bayi, dan penurunan umur harapan hidup. Dampak negatif dari peningkatan harga pupuk lebih dominan jika dibandingkan dengan dampak positif dari peningkatan harga gabah.

Kombinasi peningkatan pengeluaran sektor pertanian dan peningkatan upah pertanian memberi dampak yang lebih responsif terhadap peningkatan tenaga kerja pertanian sehingga meningkatkan PDRB dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, produksi gabah, pendapatan sektor pertanian, dan pendapatan per kapita. Selanjutnya berdampak pada peningkatan konsumsi beras, energi, dan protein, penurunan jumlah penduduk miskin, angka gizi buruk, dan angka kematian bayi, selanjutnya berdampak meningkatkan umur harapan hidup. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penurunan kesenjangan fiskal karena beban subsidi pemerintah bagi masyarakat miskin berkurang dan pendapatan dari pajak meningkat sehingga meningkatkan PAD dan penerimaan daerah. Dengan demikian, pengurangan jumlah penduduk miskin dan peningkatan kondisi kinerja ketahanan pangan, akan berpengaruh pada kinerja fiskal yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja perekonomian (PDRB), kinerja ketahanan pangan, dan penurunan kemiskinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa model cukup representatif menggambarkan fenomena yang terjadi yang ditunjukkan dengan tanda dan besaran parameter yang sesuai dengan teori ekonomi dan fenomena yang terjadi. Peubah penjelas bisa menjelaskan dengan baik variasi yang ada pada peubah endogen dan hampir semua peubah penjelas berpengaruh nyata terhadap peubah endogen dalam taraf kepercayaan sampai 80%. Hasil validasi berdasarkan kriteria statistik memberikan nilai Bias (UM), Reg (UR), dan Var (US) yang secara keseluruhan mendekati nol, serta nilai U-Theil secara keseluruhan juga mendekati nol yang mengindikasikan bahwa simulasi model secara umum relatif baik karena mendekati data aktualnya.

Peran pemerintah daerah selama masa desentralisasi fiskal belum berhasil meningkatkan penerimaannya. Hal ini tercermin dari penerimaan fiskal daerah yang didominasi oleh dana alokasi umum dengan *share* sebesar 68%. Pengeluaran daerah didominasi oleh pengeluaran rutin dengan *share* sebesar 77% sehingga pengeluaran untuk pembangunan *share*-nya menjadi relatif kecil. Kecilnya *share* dana pembangunan mengharuskan peran pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi peran dalam penggunaan dana pembangunan.

Peningkatan pengeluaran sektor pertanian berdampak paling besar pada peningkatan PDRB sektor pertanian yang selanjutnya meningkatkan kinerja ketahanan pangan menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kinerja fiskal daerah. Peningkatan harga pupuk berdampak paling besar pada penurunan penggunaan pupuk dan produksi gabah yang selanjutnya mempengaruhi kinerja ketahanan pangan, meningkatkan kemiskinan, dan menurunkan kinerja fiskal. Peningkatan harga gabah berdampak paling besar pada peningkatan produksi gabah yang selanjutnya akan meningkatkan ketahanan pangan, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan kinerja fiskal. Peningkatan upah sektor pertanian berdampak paling besar pada penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, PDRB sektor pertanian, pendapatan sektor pertanian, dan produksi gabah dan selanjutnya meningkatkan ketahanan pangan, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan kinerja fiskal.

Saran

Peningkatkan harga pupuk walaupun diikuti oleh peningkatan harga gabah yang proporsional berdampak pada penurunan pendapatan petani dan kinerja ketahanan pangan, serta meningkatkan kemiskinan. Untuk itu dalam menetapkan besaran kenaikan harga gabah dalam HPP perlu memperhitungkan besaran kenaikan harga pupuk agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Subsidi pupuk sampai saat ini masih diperlukan bagi petani, untuk itu diharapkan pemerintahan daerah dapat ikut mengamankan sehingga pupuk dapat sampai ke petani tepat waktu dengan harga terjangkau.

Kombinasi peningkatan pengeluaran sektor pertanian dengan upah sektor pertanian memberi respons yang paling baik pada peningkatan kinerja fiskal, ketahanan pangan, dan penurunan kemiskinan. Untuk itu pemerintah daerah perlu mengapresiasi dengan memberi fasilitas masyarakat pada peningkatan produktivitas petani melalui berkembangnya penciptaan diversifikasi *income* dan diversifikasi usaha pada petani baik pada lingkup *on farm* maupun *off farm* yang diikuti oleh peningkatan kualitas SDM petani melalui pendidikan dan pelatihan yang terprogram secara terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bigsten, A. 1992. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pembangunan. Ilmu Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPUI
- Ikhsan, M. 2001. *Reformasi Kebijakan Ekonomi Beras Nasional*. Tim Pengkajian Kebijakan Perberasan Nasional, Jakarta.

ILO. 1976. *Employment, Growth and Basic Needs*. Jeneva: ILO.

Pakasi, C.B.D. 2005. Dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara [disertasi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Sekolah Pascasarjana.

Pyndyck, R.S. and Rubinfeld, D.L. 1991. *Econometric Model and Economic Forcast*. Singapore: Mcgraw-Hill International Edition.

Sondakh, L.W. 1999. Mencari platform otonomi daerah dalam krisis ekonomi. Makalah dalam Seminar Nasional Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Pemberdayaan Potensi. Jakarta.

Stiglitz, J.E. 2000. *Economics of The Public Sector*. New York: W.W. Norton and Company.